

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA**

(Tesis)

**Oleh
SUNARNI**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA**

Oleh
SUNARNI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI

pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

Oleh:

Sunarni

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Indonesia dengan PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 Kabupaten/Kota untuk tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi dan PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa konsep *New Public Service* (NPS) dapat diaplikasikan dalam penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: belanja daerah, indeks pembangunan manusia, *new public service*.

ABSTRACT

THE AFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE TO INDONESIAN LOCAL GOVERNMENT HUMAN DEVELOPMENT INDEX

By:

Sunarni

This research aims to analyze the affect of government expenditure to Indonesian local government human development index with PDRB as control variable. The research employes qualitative method by secunder data using 212 local governments as sample for 2010-2012. The result shows that realization of local government expenditure in education, health and economic function and PDRB have positive affects significantly on human development index.

The findings also indicate that New Public Service (NPS) concept can be applied in research on the affect of government expenditure to local government human development index.

Keywords : government expenditure, human development index, new public service.

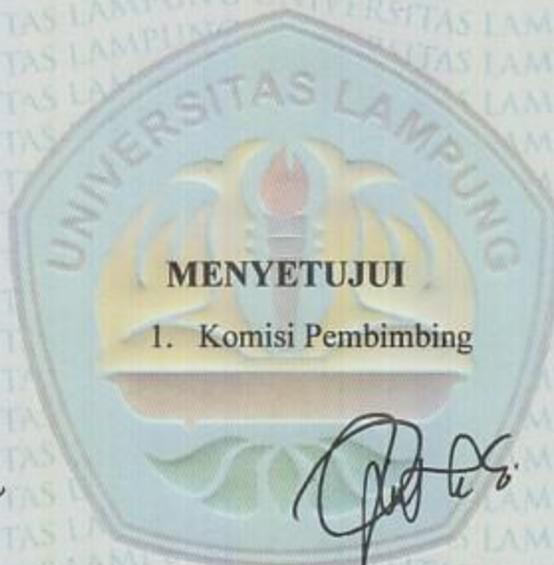
Judul Tesis : **PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Sunarni**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031063

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



fati
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002

[Signature]
Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

[Signature]
Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

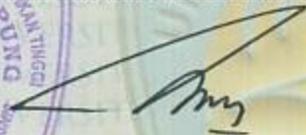
Ketua : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.** *fatri*

Sekretaris : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.** *Agrianti*

Penguji Utama : **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.** *Suparta*

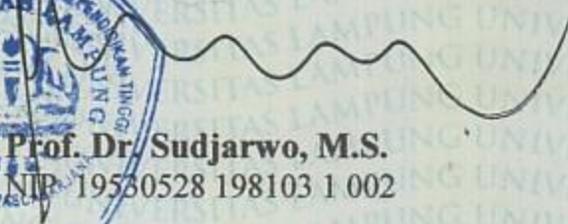
Sekretaris : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** *Rendi*

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : **17 Januari 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul :

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2017

Pembuat Pernyataan



Sunarni
NPM. 1421031063

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 1984, putri sulung dari pasangan Adi Suwarno dan Surami.

Penulis menempuh pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dasar diselesaikan di SDN 1 Pundung Rejo pada tahun 1997;
- 2) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMPN 1 Tawang Sari pada tahun 2000;
- 3) Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMKN 1 Sukoharjo pada tahun 2003;
- 4) Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2006;
- 5) Selanjutnya pendidikan Strata Satu Penulis selesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung pada tahun 2011;
- 6) Pada tahun 2015 Penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung, melalui Program STAR BPKP.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, adikku, suamiku dan anakku, yang selalu mendo'akan dan mendukung untuk keberhasilan pendidikan dan karirku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Alloh SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat selesai. Tesis dengan judul “PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Pogram Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta staf;
2. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., MBA, Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku pembimbing utama yang telah memberikan dukungan, ilmu dan kesempatan dalam membimbing penulis;
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., dan Bapak Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan sumbangsih saran dan masukan dalam membimbing penulis;
5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. dan Bapak Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., selaku pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmu demi kesempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas;
7. *State Accountability Revitalization (STAR)* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terimakasih atas beasiswa yang diberikan kepada Penulis;
8. Bupati Lampung Tengah terima kasih atas SK Tugas Belajar yang diberikan kepada Penulis;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah terima kasih atas izin Tugas Belajar yang diberikan kepada Penulis;
10. Teman-teman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama Penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
11. Bapak, Ibu dan adik terima kasih untuk dukungan dan kasih sayang yang di berikan dalam sepanjang perjalanan hidup Penulis, sehingga mampu menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
12. Suami dan anakku, yang sudah rela ditinggalkan dan memberikan do'a serta dukungan selama proses pendidikan ini berlangsung;
13. Bapak mertua dan Ibu mertua seta segenap keluarga besar Seputih Banyak terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan, selama Penulis menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

14. Mas Andri dan Mba Leni serta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Akuntansi yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan dan penyelesaian tesis;
15. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung Program STAR BPKP Angkatan II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerjasama selama ini, semoga silaturahmi kita tidak pernah putus;
16. Pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat dikemudian hari. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2017

Sunarni

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis	19
2.3 Kerangka Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
3.6 Metode Analisis dan Teknik Analisis Data	32

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
	4.1 Deskripsi Data	38
	4.2 Pengujian Hipotesis	41
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	50
	5.1 Simpulan	50
	5.2 Keterbatasan Penelitian	51
	5.3 Implikasi dan Saran Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1. Pemilihan Sampel	38
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.3. Ringkasan Hasil Uji Chow	42
Tabel 4.4. Ringkasan Hasil Uji Hausman	42
Tabel 4.5. Ringkasan Hasil Olah Statistik	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Penelitian.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang juga turut ingin berbenah berusaha menerapkan paradigma *New Public Management* (NPM) yang sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia (Eva, 2016). Pada kisaran tahun 2000, NPM mengalami perubahan menjadi *New Public Service* (NPS) yang dikenal dan digunakan sampai dengan sekarang sebagai cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi (meng-*cover*) kelemahan-kelemahan paradigma NPM.

Penerapan NPS dalam otonomi daerah diharapkan bisa menjadi titik awal penyempurnaan perjalanan otonomi daerah dan untuk mengungkap permasalahan manajemen publik. Permasalahan manajemen publik dapat dicontohkan seperti kurang meratanya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan belanja, sehingga perlu dikaji mengenai ukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dalam hal ini dapat dilihat melalui IPM.

BPS (2015) menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Wilayah yang tercatat memiliki perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan

capaian IPM tidak begitu tinggi. Bahkan, beberapa wilayah merupakan daerah dengan IPM rendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah dengan capaian IPM yang sudah tinggi. Misalnya wilayah-wilayah di Papua cenderung tumbuh lebih cepat dibanding wilayah-wilayah di DKI Jakarta dengan capaian IPM yang sudah cukup tinggi.

BPS (2015) menyatakan bahwa hingga saat ini, tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dalam hal kesenjangan capaian pembangunan manusia antar wilayah. Kesenjangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi masih relatif tinggi, terutama kesenjangan di Provinsi Papua. Kesenjangan pembangunan manusia antara Kabupaten dengan Kota juga menjadi persoalan penting. Ketimpangan yang mencolok juga terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan daerah harus direncanakan dengan baik dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas hidup manusia.

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, pemerintah menggunakan APBD-nya untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut (Maryani, 2012). Secara spesifik, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui belanja pembangunan di sektor-sektor

pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Johana (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan akan dapat memengaruhi kemiskinan jika belanja tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan bahwa; 1) variabel belanja pemerintah di provinsi DIY pada sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time lag 2 dan 3 tahun; 2) variabel belanja pemerintah di provinsi DIY pada sektor kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di provinsi DIY baik dengan pengamatan waktu menggunakan time lag 2 dan 3 tahun; 3) variabel belanja pemerintah di provinsi DIY pada sektor infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia baik dengan pengamatan waktu menggunakan time lag 2 dan 3 tahun.

Maryani (2012) menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM. Meskipun berpengaruh positif belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan masih berpengaruh kecil terhadap IPM, hal ini menandakan bahwa belanja untuk sektor tersebut belum optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Astri (2012) menguji pengaruh belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dengan hasil secara parsial variabel belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Sementara, Sanggelorang dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM dan variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara.

Berangkat dari fenomena kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia serta mengacu pada amanat UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 bahwa belanja pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi, dimana persentase anggarannya juga telah diatur dalam UU tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian diatas penulis rasa perlu untuk dilakukan pengujian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Badrudin dan Khasanah (2011) yang menguji pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Badrudin dan Khasanah (2011); 1) tidak menguji pengaruh pendapatan daerah dan belanja infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia, 2) tidak menguji pengaruh belanja daerah dengan menggunakan *time lag*, 3) menggunakan data realisasi belanja daerah menurut

fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi, 4) menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Indonesia, serta 5) memasukkan PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia?
- 2) Apakah realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia?
- 3) Apakah realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia;
- 2) Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia;
- 3) Menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai pengaruh realisasi belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010-2012.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam memahami bagaimana realiasi belanja daerah memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010-2012 dengan PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam menjelaskan fenomena belanja daerah dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia . Dalam bab ini juga akan diuraikan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini memaparkan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, serta metode analisis dan teknik analisis data penelitian ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V: Simpulan dan Saran

Bab ini memaparkan simpulan, keterbatasan penelitian serta implikasi dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *The New Public Service* (NPS)

Public servants do not deliver customer service; they deliver democracy; Para birokrat tidak bekerja untuk melayani pelanggan, tetapi untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi (Denhardt dan Denhardt, 2007). Frederickson (1997) secara tegas menyatakan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau administrasi publik sepatutnya diorientasikan kepada warga negara (*citizens*), warga negara dipandang tidak sekedar konsumen atau pelanggan (*customers*). Pandangan warga negara sebagai pelanggan adalah konsisten dengan interpretasi ekonomi pada kehidupan politik. Denhardt dan Denhardt (2007) menyatakan “*that government ultimately reflects the accumulated self-interests of largely disconnected and utility maximizing individuals*”.

Denhardt dan Denhardt (2007) telah menegaskan garis-garis besar pemikiran *The New Public Service* sebagai berikut :

1. *Service citizens, not customers : the public interest is the result of a dialogue about shared values rather than the aggregation of individual self-interest.*

2. *Seek the public interest : public administrator contribute to building a collective, shared notion of the publik interest.*
3. *Value citizenships over entrepreneurship : the public interest is better advanced by public servants and citizen comitted to making meaningful contributions to society than by entrepreneurship managers acting as if public money their own.*
4. *Think strategically, act democratically : policies and programs meeting public need can be must effectively and responsibility achieved through collective efforts and collaborative processes.*
5. *Recoqnize that accountability is not simple : public servant should be attentive to more than the market ; they should also attend to statutory and constitutional law, community values, political norms, professional standards, and citizen interest.*
6. *Serve rather than steer : it is increasingly important for public servant to use shared, values based leadership in helping citizens articulate and meet their shared interest rather than attempting to control or steer society in new direction.*
7. *Value people, not just productivity.*

Denhardt dan Denhadrt (2007) menyatakan administrator publik berkewajiban untuk berdialog bersama dengan masyarakat untuk dapat menyaring persoalan publik dan isu-isu publik yang menjadi domain kerjanya, merespon dan mengartikulasikannya hingga masuk ke kebijakan publik, karena warga negara percaya dan punya keyakinan dengan kapasitasnya.

Reinventing government itu pada hakekatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (*entrepreneurship*) kedalam birokrasi pemerintah (Thoha, 2008). Jiwa *entrepreneurship* itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa produktif, dari yang berproduktivitas rendah menjadi berproduktivitas tinggi.

Gaspersz (2004) melakukan identifikasi terhadap *stakeholders* berkaitan dengan mereka yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jasa-jasa

pelayanan publik, atau mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kebijakan-kebijakan organisasi publik. *Stakeholder* merupakan setiap orang atau kelompok yang berkepentingan dengan tingkat kinerja atau kesesuaian dari suatu organisasi publik, program atau sub programnya. Mereka mungkin saja menjadi penasehat atau pemberi rekomendasi terhadap organisasi publik, karena mempunyai kepentingan dengan tingkat kinerja atau kesesuaian dari organisasi publik.

Pilihan terhadap NPS dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan yang demokratis untuk meningkatkan suatu pelayanan publik. NPS berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Penggunaan NPS tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja daerah.

2.1.2 Belanja Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah dimaknai sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Halim dan Mujid (2009) belanja daerah merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Selain itu, menurut Mardiasmo (2002) belanja daerah juga merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Selain itu tujuan klasifikasi belanja fungsi adalah sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja serta untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja berdasarkan fungsi terdiri atas: belanja fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan ketentraman, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Sedangkan fungsi pertahanan dan agama bukan merupakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara penuh.

2.1.2.1 Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan

Baldacci et al. (2004) menyatakan “*But a greater share of investment in human capital should be channeled toward primary education*” (bagian yang lebih besar dari investasi dalam modal manusia harus disalurkan menuju pendidikan).

Masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan.

Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi dan realisasi anggaran belanja pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Ranis dan Stewart (2005) menyatakan pendidikan yang luas akan meningkatkan

distribusi pendapatan dari waktu ke waktu kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari peluang ekonomi.

2.1.2.2 Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui dua saluran : 1) pertumbuhan ekonomi, dan 2) mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran (Aviyati dan Susilo, 2016).

Pembahasan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, swasta, lembaga kementerian dan pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari belanja rumah tangga.

Mengingat besarnya pengaruh belanja pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari sektor kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan realisasi belanja pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan (Bastias, 2010).

2.1.2.3 Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi

Musgrave dan Musgrave (1980) menyatakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat memengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

1. *Resources Transfer* (perpindahan sumber daya). Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/*transfer input* dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan anggaran pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan *input* yang ada dalam perekonomian sehingga *input* yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi *input* dalam suatu perekonomian.
2. *Incident* (distribusi pendapatan). Perubahan alokasi *input* akibat perubahan kebijakan belanja pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika belanja pemerintah meningkat berarti *transfer input* dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Di sisi lain peningkatan belanja tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan *input* untuk publik.
3. *Output Effect* (perubahan terhadap *output*). Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat

output dalam suatu perekonomian (*Product Domestic Bruto/PDB*) maupun penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan belanja pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi *input* yang selanjutnya memengaruhi *output* yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Belanja fungsi ekonomi memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pembangunan manusia. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Sukirno (2000), PDRB merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memerhatikan kepemilikan atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. (Marhaeni dkk, 2008).

BPS (2015) menyatakan bahwa Indonesia mulai mengaplikasikan perhitungan IPM dengan metode baru tahun 2014. Sejak saat itu Indonesia telah meninggalkan perhitungan IPM dengan metode yang lama. Perhitungan IPM dengan metode baru ini memberikan potret pembangunan manusia yang lebih utuh. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010-2014, IPM Indonesia telah meningkat 2,37 poin yaitu dari 66,53 menjadi 68,90. Dalam kurun waktu itu, IPM Indonesia tumbuh 0,89 persen per tahun.

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Agregasi indeks juga mengalami perubahan. Semula, agregasi indeks menggunakan rata-rata hitung. Pada IPM dengan metode baru, perhitungan indeks menggunakan rata-rata geometrik. Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM

dengan metode baru memiliki sejumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung dengan metode lama (BPS, 2015).

Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama. Agregasi indeks dengan menggunakan rata-rata geometrik juga menjadikan capaian yang rendah pada salah satu komponen indeks tidak dapat ditutupi oleh komponen indeks lain yang capaiannya lebih tinggi. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf yang diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*), dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk, karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana UNDP (1990) menyatakan sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya:

1. Pembangunan harus megutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseleruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pertumbuhan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapasitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya.

Begitu pula jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah, berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan serta perlu dipertahankan agar kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dan kesejahteraan rakyatpun dapat tercapai.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jong Wha Lee (1992)	<i>Economic Growth and Human Development in the Republic of Korea 1945-1992</i>	<i>Economic growth and human development have been closely related and interacted with each other throughout periods of high economic growth.</i>
2.	S. Andrew Rajkumar dan Vinaya Swaroop (2008)	<i>Public Spending and Outcomes: Does Governance matter?</i>	<i>Public health spending lowers child mortality rates more in countries with good governance. Similarly, public spending on primary education becomes more effective in increasing primary education attainment in countries with good governance.</i>
3.	Rudy Badrudin dan Mufidhatul Khasanah (2011)	Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap pembangunan manusia dengan time lag 2 dan 3 tahun
4.	Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.	DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif.
5.	Tri Maryani (2012)	Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah	Belanja bidang pendidikan, belanja pemerintah bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap IPM.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Deni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	IPM mengalami peningkatan mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
7.	Desy Suryati (2015)	Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012	Semua belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi memberikan pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan sedangkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan dan belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan.
8.	Septiana M.M Sangelorang, Vikie A. Rumate dan Hanly F.DJ. Siwu (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara	Variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif.
9.	Anugrah Priambodo (2015)	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
10.	Syivai Aviyati dan Susilo (2016)	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur	Belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan selama periode 2007-2012 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan belanja pemerintah bidang infrastruktur menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, pertumbuhan penduduk sebagai variabel kontrol menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.

Sumber: Data diolah (2016)

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

Musgrave dan Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar maka presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke belanja-belanja untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi hingga kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan *output* agregat jika modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi agregat.

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi semakin

bertambah. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana

untuk menyejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja pemerintah untuk kesejahteraan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Disisi lain, Rajkumar dan Swaroop (2008) menyatakan penelitian-penelitian diberbagai negara maju dan berkembang telah menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah yang efisien dan memadai untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi beban kemiskinan. Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari meningkatnya IPM.

2.2.2.1 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009. Astri (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Sanggalorang dkk (2015) menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah di

bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap IPM di Sulawesi Utara. Penelitian Aviyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan selama periode 2007-2012 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (BPS, 2015). Pendidikan merupakan modal manusia untuk mendapat penghidupan yang layak dan memiliki SDM yang bisa mengikuti perkembangan dunia. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan suatu daerah sehingga dalam hal ini pemerintah mengalokasikan belanja daerah menurut fungsi pendidikan. Alokasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan tersebut direalisasikan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya digunakan untuk membiayai penelitian siswa maupun pendidik, belanja untuk pengadaan buku penunjang kegiatan belajar mengajar siswa dan belanja untuk operasional siswa maupun pendidik untuk mengikuti pelatihan. Adapun yang paling penting adalah bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan tersebut bisa benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan yang mampu meningkatkan IPM tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan. Hal ini terkait dengan pemikiran bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan dapat dirasakan dampaknya terhadap IPM pada tahun yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2.2 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan. Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Aviyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan selama periode 2007-2012 juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan mampu meningkatkan IPM yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan. Hal ini terkait dengan pemikiran bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan dapat dirasakan dampaknya terhadap IPM pada tahun yang sama.

Kesehatan juga merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur dengan indeks harapan hidup ketika lahir. Sehingga apabila angka harapan hidup suatu daerah meningkat setiap tahunnya maka daerah tersebut tergolong daerah yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik selain dilihat juga dari sisi pelayanan kesehatan serta fasilitas penunjang kesehatannya. Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah mengalokasikan dan

merealisasikan belanja daerah menurut fungsi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.2.3 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut dan Musgrave (1980) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu *resources transfer* (perpindahan sumber daya), *incident* (distribusi pendapatan) dan *output effect* (pemisahan terhadap *output*). Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat memengaruhi alokasi *input* dalam suatu perekonomian.

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah standar hidup layak. Standar hidup layak menggambarkan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai dampak dari membaiknya ekonomi. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan standar hidup layak.

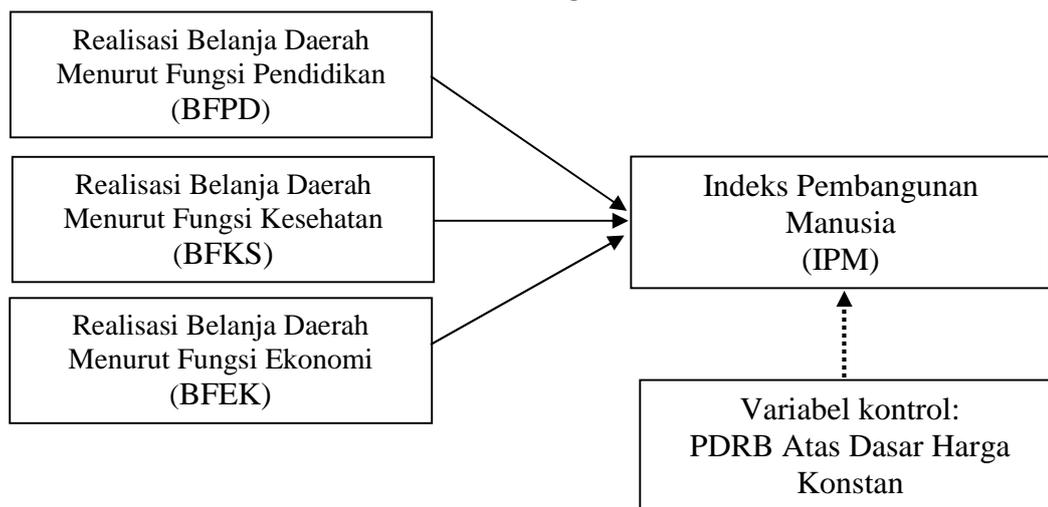
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2.3 Kerangka Penelitian

Model yang dapat dikembangkan berdasar teori dan pengembangan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh realisasi belanja daerah yang diukur dengan realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi serta menambahkan variabel kontrol PDRB atas dasar harga konstan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Adapun sampel penelitian ini adalah 212 Kabupaten/Kota, dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota menyampaikan data realisasi APBD dan dipublikasikan pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan secara berturut-turut pada tahun 2010-2012.
2. Memiliki data IPM dan data PDRB atas dasar harga konstan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2010-2012 serta dipublikasikan pada *website* www.bps.go.id

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa realisasi belanja fungsi pendidikan, realisasi belanja fungsi kesehatan dan realisasi belanja fungsi ekonomi tahun 2010-2012 yang penulis dapatkan melalui *website* Dirjen Perimbangan Keuangan yaitu <http://www.djpk.go.id>. Sedangkan data IPM tahun 2010-2012 serta data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010-2012 penulis peroleh dari website Badan Pusat Statistik yaitu <http://www.bps.go.id>.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi pustaka yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.3 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini IPM digunakan sebagai variabel dependen. Menurut Sanggelorang dkk (2015), IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut adalah

indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Dalam mengukur IPM (BPS, 2015) merumuskan:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan metode baru (BPS, 2015), dengan tingkatan dan capaian IPM sebagai berikut:

- 1) Kelompok sangat tinggi: $IPM \geq 80$
- 2) Kelompok tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 3) Kelompok sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 4) Kelompok rendah: $IPM < 60$

3.5.3 Variabel Independen

3.5.2.1 Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan (BFPD)

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka realisasi belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan tinggi yang diperoleh masyarakat diharapkan akan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi pendidikan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural.

3.5.2.2 Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan (BFKS)

Belanja daerah menurut fungsi kesehatan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang kesehatan, yang tercermin pada realisasi APBD untuk bidang kesehatan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Belanja kesehatan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi kesehatan dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural.

3.5.2.3 Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi (BFEK)

Belanja daerah menurut fungsi ekonomi memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya realisasi APBD di sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan IPM. Karena dalam komponen IPM faktor ekonomi juga berperan meningkatkan IPM yang dilihat dari standar hidup layak. Dalam cakupan luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Belanja ekonomi ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi ekonomi dalam satuan rupiah yang dilakukan logaritma natural.

3.5.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Penggunaan PDRB ini merujuk dari penelitian Ng'habi (2012) yang mengkaji dari UNDP, yang menyatakan bahwa PDRB dan perkembangan manusia berhubungan erat dimana pembangunan manusia merupakan *input* dari pertumbuhan ekonomi namun pada gilirannya pertumbuhan ekonomi akan mengaktifkan pengembangan manusia.

PDRB merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi suatu daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal. Dalam penelitian ini digunakan nilai PDRB Riil yang nilainya diukur atas dasar harga konstan tahun 2010.

3.6 Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010-2012, maka metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi data panel dengan bantuan *software* Eviews 8 dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik dengan langkah-langkah:

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan nilai *mean*, *median*, standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali dan Ratmono, 2013). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Analisis ini akan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu belanja daerah yang dalam hal ini adalah realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan *cross-section*. Data panel sering disebut juga *pooled data* (*pooling time series* dan *cross-section*), *micropanel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, dan *cohort analysis*. Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit *cross-sectional*. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan data (*data set*) dimana perilaku unit *cross-sectional* (misalnya individu, perusahaan, negara) diamati sepanjang waktu (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Menurut Wibisono (2005) dalam Ajija dkk (2011), keunggulan regresi data panel antara lain: Pertama, data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks; ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan (*degrees of freedom*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; keenam, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Menurut Widarjono (2013), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

1. Model *Common Effect*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Model *Common Effect* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model *Fixed Effect*

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan *slope* antar individu adalah tetap (sama).

3. Model *Random Effect*

Metode *Random Effect* adalah metode yang akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik yang digunakan dalam Metode *Random Effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar entitas.

Pengujian estimasi ketiga model regresi data panel dilakukan dengan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* (Widarjono, 2013). Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan metode *Common Effect* atau dengan metode *Fixed Effect*, apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan Uji *Hausman*, namun apabila dari hasil Uji *Chow* tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji *Hausman* untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood ratio test*, dengan asumsi yaitu: H0: model mengikuti *Common Effect* dan H1: model mengikuti *Fixed Effect*. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *Hausman test* dengan asumsi yaitu: H0: model mengikuti *Random Effect* dan H1: model mengikuti *Fixed Effect*.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi, sedangkan variabel dependen adalah IPM. Penelitian ini menduga bahwa IPM dipengaruhi oleh realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi. Namun demikian ada faktor lain yang tidak diketahui yang memengaruhi IPM.

Adapun model statistika dari regresi data panel penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{t+1} = \alpha_0 + \alpha_1 BFPD_t + \alpha_2 BFKS_t + \alpha_3 BFEK_t + \alpha_4 PDRB_t +$$

Keterangan:

IPM_{t+1} = Indek Pembangunan Manusia pada tahun t+1

$BFPD_t$ = Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan pada tahun t

$BFKS_t$ = Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan pada tahun t

$BFEK_t$ = Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi pada tahun t

$PDRB_t$ = PDRB atas dasar harga konstan pada tahun t

α_0 = Konstanta

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$ = Koefisien variabel independen

= *Error term*

Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program Eviews 8. Kriteria

pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $p \text{ value} > 0,05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari α 0,05 yang berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $p\text{ value} < 0,05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai α 0,05 yang berarti model regresi dalam penelitian layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

3.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja menurut fungsi ekonomi terhadap IPM. Semakin besar R^2 maka menunjukkan semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik maupun pembahasan komprehensif berdasarkan fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan investasi yang utama dalam mencapai SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga perlu untuk diprioritaskan pengalokasian anggaran serta realisasinya.
2. Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Peningkatan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang memadai dapat peneliti maknai sebagai pengaruh positif realisasi belanja fungsi kesehatan dalam kontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat sehingga akan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam

peningkatan perekonomian dan meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

4. PDRB atas dasar harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti belanja PDRB atas dasar harga konstan berkontribusi dan memengaruhi peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga variabel yang ada dalam belanja daerah menurut fungsi, sedangkan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 jumlah belanja daerah menurut fungsi seluruhnya berjumlah 9 (sembilan). Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan lebih dari 3 (tiga) belanja daerah menurut fungsi agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Sampel akhir adalah 212 Kabupaten/Kota di Indonesia, dikarenakan pada saat peneliti mengolah data, data terbaru realisasi belanja menurut fungsi yang berasal dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah realisasi belanja daerah tahun anggaran 2012. Penggunaan data tahun yang lebih baru dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari realisasi belanja menurut fungsi.
3. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan

dan realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi secara global dan tidak menganalisis pengaruh masing-masing Kabupaten/Kota terhadap IPM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti secara individu pada Kabupaten/Kota di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

5.3 Implikasi dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi dan saran baik dalam praktik maupun bagi penelitian yang akan datang, yaitu:

1. Hasil temuan menunjukkan bahwa konsep *New Public Services* (NPS) dapat diaplikasikan dalam penelitian yang menjelaskan pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar bisa benar-benar terserap oleh masyarakat guna meningkatkan IPM daerah tersebut.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya bagi anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan untuk memajukan pembangunan daerah. Kemudian mengoptimalkan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta melakukan kontrol atau pengendalian dalam penyaluran anggaran publik tersebut agar benar-benar sampai ke sasaran program dan sasaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrur R. Dyah W Sari, H. Setianto Rahmat dan R. Primanti Martha. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astri, Meylina, 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis*. Vol. 1. No. 1 Tahun 2012.
- Aviyati, Syivai dan Susilo. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Baldacci, Emanuele. Benedict Clements, Sanjeev Gupta and Qiang Cui. 2004. Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs. *IMF Working Paper WP/04/217*. November 2004.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Universitas Diponegoro Semarang.
- BPS, 2015. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 Metode Baru*. <http://www.bps.go.id> Diunduh tanggal 3 Agustus Tahun 2016.
- BPS, 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2010-2014*. <http://www.bps.go.id> Diunduh tanggal 3 Agustus Tahun 2016.
- Denhadrt, Janet V and Denhardt Robert. B. 2007. *The New Public Service*. London: M.E. Sharpe, Inc.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *LGF Realisasi Belanja Fungsi Tahun 2010*. www.djpk.go.id. Di unduh tanggal 5 Oktober 2016.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *LGF Realisasi Belanja Fungsi Tahun 2011*. www.djpk.go.id. Di unduh tanggal 5 Oktober 2016.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *LGF Realisasi Belanja Fungsi Tahun 2012*. www.djpk.go.id. Di unduh tanggal 5 Oktober 2016.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Eva, Bernadeta Maria, 2016. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten/ Kota se- Sumatera Tahun 2014.
- Frederickson, George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Gaspersz, V. 2004. *Production Planning and Inventory Control*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Edisi Pertama. UNDIP.
- Ginting, Charisma K.S., Irsad Lubis dan Kasyful Mahalli. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Vol 04, No. 01. Wahana Hijau.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujid. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat- Daerah, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Johana, Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1, No. 1.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan Pertama. YKPN Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percepatan Akademi Manajemen Perusahaan.
- Lee, Jong Wha. 1992. Economic Growth and Human Development in the Republic of Korea 1945-1992. *Ocasional Paper*. Vol. 24. Februari 2006.
- Ma'ruf, Ahmad dan Lastri Wihastuti. 2008. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 9, No. 1. April 2008.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Marhaeni, Harmawanti. Sri Yati dan Bambang Tri Budhi M. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia. Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Maryani, Tri, 2012. Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Mauriza, Sazli, Abu Bakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad. 2013. Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 1 No.2.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economic Development Analysis Journal*.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave. 1980. *Public Finance in Theory and Practice*. Edisi Ketiga. Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
- Ng'habi, Ntogwa Bundala. 2012. *Economic Growth and Human Development : A Link Mechanism: An Empirical Approach*.
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Rajkumar, Sunil Andrew and Vinaya Swaroop. 2008. *Public Spending and Outcomes: Does Governance matter?*. Washington DC. United States: World Bank.
- Ranis, Gustav and Frances Stewart. 2005. Dynamic Link between the Economy and Human Development. *Economic and Social Affairs*. DESA Working Paper No. 8.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Anggaran Kesehatan.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
- Sanggalorang, Septiana, MM, Vikie A. Rumate dan Hanly F.DJ. Siwu. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 15. No. 02. Edisi Juli 2015.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1. 2016
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Prestasi Vol. 9 No. 1. Juni 2012.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumiyati, Euis Eti. 2011. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat*.
- Suparto, 2005. *Pengaruh Variabel Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1999-2002*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM. Tidak dipublikasikan.
- Suryati, Desy. 2015. *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012*. Bina Ilmiah Vol 9 No. 7. Desember 2015.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Todaro, MP. 2000. *Economic Development*. Seventh Edition. New York: Addition Wesley.
- UNDP. 1990. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonesia FE UII.

- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi keempat. Yogyakarta: Ekonesia FE UII.
- Widodo, Waridin Adi dan Maria K, Johanna. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah. Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pmebangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1 No. 1.
- Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 3, No. 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.